

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BAPPEDA Kulon Progo keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Good Governance and Clean Governance*). Dalam melaksanakan pengawasan :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kulon Progo sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (BAPPEDA) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah mampu merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh.
- b. Tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (BAPPEDA) sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali. Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat di laksanakan dan ditindak

penilaian kepemimpinan (DP3) serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

- c. Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi pengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan kinerja dari tim Pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan. Peningkatan kinerja tim Pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak lepas juga untuk menciptakan *Good Governance and Clean Governance*. Peningkatan kinerja sebuah tim pemeriksa secara tidak langsung mendorong menciptakan suatu tim pemeriksa yang bekerja optimal.

2. Faktor yang menjadi permasalahan terhadap pengawasan melekat terhadap disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan BAPPEDA Kulon Progo adalah:

- a. Perasaan kurang tega untuk menindak bawahan atau mungkin memiliki hubungan famili dengan atasan. Dengan kata lain kurang adanya kreativitas pada personil dalam sebuah tim pemeriksa.
- b. Penempatan pimpinan yang kurang tepat sehingga atasan tidak menguasai bentuk pelaksanaan pekerjaan bawahan.
- c. Takut timbul reaksi karena Pimpinan memiliki kelemahan sendiri

yang mungkin akan dibongkar bawahan

- d. Kolusi atasan ikut terkena hasil penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan bawahan.
- e. Hasil pengawasan dari seorang pimpinan tidak segera diambil tindakan.

## **B. Saran**

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, ekonomis dan taat kepada peraturan perundangan-undangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka perlu adanya :

1. Pelaksanaan pengawasan fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo harus profesional dalam melakukan pengawasan dengan hati hati dan menggunakan kemahirannya secara cermat, cerdas, dan akuntabel. Dengan demikian Pengawas harus berani menyampaikan laporan hasil audit pemeriksaan sesuai dengan kenyataan apa adanya tanpa ada rasa takut dan sungkan.
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan bisa membawa dampak terhadap perbaikan manajemen pemerintah antara lain pada aspek ketatalaksanaan dan sumber daya manusianya. Untuk itu perlu adanya kematangan dalam penyampaian hasil pengawasan yang memenuhi

3. Pengawasan berpengaruh pada disiplin kerja Pengawas , antara lain segala tindakan dan perilaku selama dalam pelaksanaan pemeriksaan tetap berpedoman pada kode etik dan standar audit.
4. Perilaku pemeriksa dalam interaksi sesama pemeriksa berkewajiban untuk menggalang kerjasama yang sehat, untuk itu pemeriksa harus sadar akan tujuan membuat komponen dalam tim yang memiliki